

PANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DPRD KOTA SALATIGA



TERHADAP
RAPERDA RPJMD KOTA SALATIGA
TAHUN 2025-2029

PANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
TERHADAP
RAPERDA RPJMD KOTA SALATIGA TAHUN 2025-2029

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Salam sejahtera untuk kita semua

Yth. Wali Kota Salatiga;

Yth. Wakil Wali Kota Salatiga;

Ykh. Jajaran Forkopimda Kota Salatiga;

Ykh. Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Salatiga;

Ykh. Sekretaris Daerah dan Sekretaris DPRD Kota Salatiga;

Ykh. Para Asisten Sekda dan Staf Ahli Walikota;

Ykh. Seluruh Kepala OPD di Lingkungan Pemerintah Kota
Salatiga;

Ykh. Para Camat dan Lurah se Kota Salatiga

Ykh. Para Hadirin dan Tamu Undangan yang berbahagia.

Marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Semesta Alam yang atas ridho-Nya pada kesempatan yang berbahagia ini masih berkenan melimpahkan berbagai kenikmatan dan kesempatan kepada kita semua.

Sidang Paripurna yang kami hormati

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera memahami dan bersepakat bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) memiliki arti

penting dan bernilai strategis dalam pembangunan sebuah daerah. RPJMD juga menjadi panduan bagi Pemerintah Daerah dalam mewujudkan Visi-Misi pembangunan daerah.

Demikian juga halnya di Kota Salatiga. RPJMD menjadi dokumen penting yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan jangka menengah Kota Salatiga, serta akan digunakan sebagai pedoman penyusunan RPJMD periode lima tahunan Kota Salatiga.

Setelah mempelajari dan mendalami Rancangan Akhir Peraturan Daerah yang diajukan, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Kota Salatiga menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera merespons terkait cita-cita Kota Salatiga untuk 20 tahun ke depan yang dinyatakan dalam pernyataan visi dalam RPJPD Kota Salatiga. Visi RPJPD Kota Salatiga 2025-2045 adalah “Kota Salatiga sebagai Kota yang maju, adil, sejahtera, dan Berkelanjutan”. Visi ini dimaknai bahwa pembangunan dilaksanakan secara dinamis dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mewujudkan daerah yang kreatif, unggul, maju, dan nyaman untuk dihuni baik penduduk asli, pendatang, domisili maupun yang berkunjung ke Kota Salatiga.

Untuk mewujudkan cita-cita luhur itu, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera melihat bahwa Misi yang akan dijalankan telah sangat jelas dan ideal mendeskripsikan berbagai upaya yang akan dilaksanakan dengan mempertimbangkan isu strategis kota, RTRW kota, RPJPN 2025-2045, dan RPJPD Provinsi Jawa Tengah 2025-2045.

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera berharap Pemerintah Kota Salatiga akan mampu menjaga konsistensi pembangunan Kota Salatiga dalam jangka panjang, dengan tetap berpedoman pada visi-misi tersebut. Ibaratnya mengemudikan kendaraan roda empat, Salatiga sudah berjalan dengan menggunakan gigi 4 dalam RPJPD Kota Salatiga 2025-2045 dan harapannya RPJMD Kota Salatiga melaju dengan gigi 5 untuk berjalan stabil dan tenang menuju pencapaian RPJPD. Namun

dalam RPJMD Kota Salatiga 2025-2029 seolah mengganti ke gigi 3 dan bertahan di gigi 4.

Analogi tersebut dikemukakan apabila melihat kesinambungan Visi Kota Salatiga dalam RPJPD Kota Salatiga 2025-2045, “Kota Salatiga yang Maju, Adil, Sejahtera dan Berkelanjutan,” ke Visi Kota Salatiga dalam RPJMD Kota Salatiga 2025-2029, “Terwujudnya Kota Salatiga sebagai Kota BEDA: Bergerak, Energik, Dinamis, dan Adaptif.” Penyelarasan yang dilakukan BAPPEDA dalam Rancangan Akhir RPJMD Kota Salatiga halaman III-10 begitu dipaksakan dan cenderung tidak tepat. Maju dalam RPJPD Kota Salatiga 2025-2045 yang dipadankan dengan Bergerak dalam RPJMD Kota Salatiga 2025-2029 tidak tepat.

RPJPD Kota Salatiga 2025-2045 sudah memvisikan Salatiga **Maju**, bukan Bergerak. Maju dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti berjalan ke muka, menjadi lebih baik atau telah mencapai, berada pada tingkat peradaban tinggi, dan cerdas, berkembang pikirannya. Sedangkan Bergerak dalam KBBI ‘hanya’ berarti berpindah dari tempat atau kedudukan (tidak diam) dan melakukan suatu usaha, berusaha giat. Artinya bahwa Visi Salatiga 2025-2045 sudah ditentukan akan berada pada kondisi **Maju**, tidak *hanya sekedar* berpindah atau melakukan usaha, tetap sudah berada di suatu kondisi yang disebut **Maju**.

Visi Salatiga Maju karena bertolak dari inventarisasi permasalahan dan isu strategis yang telah dimuat dalam RPJPD Kota Salatiga 2025-2045 halaman III-1 sampai dengan III-17. RPJPD Kota Salatiga 2025-2045 bahkan sudah mengelompokkan isu kota Salatiga yaitu antara lain, kesejahteraan yang adil dan merata, perekonomian daerah yang berdaya saing, pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan tantangan perubahan iklim, kualitas sumber daya manusia yang unggul, kualitas tata kelola pemerintahan yang dinamis dan adaptif, dan bonus demografi.

Artinya bahwa ketika RPJPD Kota Salatiga 2025-2045 sudah memproyeksikan dengan visi **Maju**, maka dengan mengatasi isu kota Salatiga dapat menempatkan kota Salatiga menjadi kota yang maju

dengan pencapaian kesejahteraan didasarkan pada perekonomian yang berdaya saing dengan memperhatikan lingkungan yang berkelanjutan, kualitas sumber daya manusia termasuk bonus demografi dan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik. Kota Salatiga tidak sekedar Bergerak, tapi sudah diproyeksikan Maju.

Maju menjadi salah satu aspek visi yang dikemukakan untuk menjadi contoh belum selarasnya RPJMD Kota Salatiga 2025-2029 dengan RPJPD Kota Salatiga 2025-2045. Penyelarasan keduanya perlu berpikir reflektif dan strategis terhadap apa yang sudah dicapai dan dicanangkan dalam RPJPD Kota Salatiga 2025-2045. Sehingga kondisi **Maju** yang sudah ditentukan, melalui RPJMD Kota Salatiga 2025-2029 berada di jalur yang tepat, tidak sekedar Bergerak tetapi dengan Sasaran Pokok dan Arah Pembangunan dalam RPJPD Kota Salatiga 2025-2045 didesain sudah **Maju**.

2. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) memiliki arti penting dan bernilai strategis dalam pembangunan Kota Salatiga. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera mengapresiasi Pemerintah Kota Salatiga yang telah menyusun RPJPD kota Salatiga 2025-2045 dengan komprehensif dan sistematis. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera juga melihat dokumen RPJPD ini telah disusun dengan berbasiskan data ilmiah yang diuraikan dalam Naskah Akademik. Namun sepertinya RPJPD Kota Salatiga 2025-2045 tidak menjadi referensi utama dalam menyelaraskan dengan RPJMD Kota Salatiga 2025-2029 dari aspek kualitas, elaborasi isu strategis dan tantangan kota Salatiga yang sudah terinventarisasi.

Dalam hal ini, penyusun RPJMD Kota Salatiga 2025-2029 belum menyelaraskan, tapi cenderung ‘merudapaksa’ Visi dan Misi (calon) Walikota dan Wakil Walikota pada Pilkada 2024 ke dalam (rancangan) RPJMD Kota Salatiga. RPJPD Kota Salatiga 2025-2045 telah menentukan Arah Kebijakan (dan Sasaran Pokok) dan menyusun tahapan RPJPD menjadi 4 (empat) tahap, yaitu (*lihat gambar*)



Dari gambar diatas, jelas dapat diketahui bahwa Tahap I RPJPD Kota Salatiga 2025-2045 adalah **Penguatan Fondasi Pembangunan Daerah**. Ketidakselarasan RPJPD Kota Salatiga 2025-2045 dengan RPJMD Kota Salatiga 2025-2029 ditunjukkan dengan melakukan perbandingan Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok RPJPD dengan Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan RPJMD (*lihat tabel*)

RPJPD 2025-2045 (Tahap I)		RPJMD 2025-2029	
Arah Kebijakan	Sasaran Pokok	Arah Kebijakan	Program Prioritas
Transformasi Ekonomi untuk mewujudkan Perekonomian yang Berdaya Saing melalui Pengembangan Sektor Unggulan yang Berkelanjutan	Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang terdidik, sehat dan berkualitas	Pembangunan tahap pertama (2026) selain difokuskan pada peningkatan ketahanan pangan daerah, juga diarahkan pada Peningkatan Pembangunan SDM dan pengelolaan potensi perekonomian daerah didukung pemerintahan berintegritas dan infrastruktur berkualitas , yang diprioritaskan pada: a. Peningkatan kualitas pembangunan sumber daya manusia b. Peningkatan pengelolaan potensi perekonomian daerah. c. Peningkatan kualitas ASN dan implementasi budaya kerja yang berintegritas dan handal. d. Peningkatan identifikasi dan inventarisasi sumber daya serta masalah lingkungan hidup Kota Salatiga. e. Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan guna	

		menunjang efektivitas layanan perkotaan	
Transformasi Tata Kelola untuk mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang Baik, Bersih, Adil, dan Demokratis dengan Memanfaatkan Teknologi Informasi	Terwujudnya Keadilan dan Kesejahteraan Masyarakat	Pembangunan tahap kedua (2027) selain difokuskan pada pengembangan kepariwisataan dan ekosistem ekonomi kreatif didukung dengan SDM Unggul, juga diarahkan pada Pengembangan SDM yang sehat dan cerdas dan perekonomian daerah yang unggul, didukung pelayanan publik bermutu dan infrastruktur wilayah yang sesuai daya dukung lingkungan hidup , yang diprioritaskan pada: a. Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan berkarakter. b. Pengembangan potensi perekonomian daerah yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif c. Pengembangan pelayanan publik yang bermutu dan berorientasi pada kepuasan masyarakat d. Integrasi rencana tata ruang dengan instrumen pengelolaan lingkungan hidup	
Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan untuk Mewujudkan Keadilan dan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pemerataan Pembangunan dan Pengentasan Kemiskinan	Terwujudnya Perekonomian yang Berdaya Saing	Pembangunan tahap ketiga (2028) selain difokuskan pada pemerataan perekonomian daerah yang maju dan inklusif dengan infrastruktur kota yang terintegrasi dan ramah lingkungan, juga diarahkan pada penguatan daya saing sumber daya manusia dan perekonomian daerah didukung pemerintahan yang akuntabel berbasis digital, dan Infrastruktur berkualitas sesuai prinsip pembangunan berkelanjutan , yang diprioritaskan pada: a. Penguatan daya saing sumber daya manusia Penguatan. b. Perekonomian daerah berbasis sektor unggulan daerah. c. Penguatan tata Kelola pemerintahan yang akuntabel berbasis digital. d. Penguatan pengelolaan lingkungan hidup yang berorientasi pada partisipasi publik dan kolaborasi multi pihak. d. Penguatan Infrastruktur Kewilayahan yang berkualitas sesuai prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan	
Transformasi Sosial untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, adil dan demokratis	Pembangunan tahap keempat (2029) selain difokuskan pada Menumbuhkan Daya Saing Daerah, juga diarahkan pada Pemantapan sumber daya manusia yang unggul dan pertumbuhan ekonomi daerah yang tinggi didukung pemerintahan yang dinamis, adaptif dan modern, infrastruktur yang merata, dan lingkungan hidup berkualitas , yang diprioritaskan pada: a. Pemantapan sumber daya manusia yang unggul dan berbudaya b. Pemantapan	

		<p>pertumbuhan ekonomi daerah dengan mengoptimalkan pengelolaan potensi perekonomian daerah. c. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan modern d. Pemantapan pengawasan pembangunan dalam mencapai ketaatan terhadap ketentuan tata ruang dan lingkungan. e. Pemantapan kualitas Infrastruktur wilayah guna penunjang pemenuhan kebutuhan masyarakat</p>	
<p>Ketahanan Ekologi untuk mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan dan Adaptasi Perubahan Iklim</p>	<p>Terwujudnya Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan adaptasi perubahan iklim</p>	<p>Pembangunan tahap kelima (2030) selain difokuskan pada Perwujudan Kota Salatiga sebagai Kota BEDA, juga diarahkan pada Pemerataan SDM yang unggul dan produktif, perekonomian daerah yang maju dan inklusif, pelayanan publik berkualitas, dan Infrastruktur Kewilayahan yang terintegrasi dan ramah lingkungan, yang diprioritaskan pada: a. Pemerataan SDM yang unggul dan produktif b. Pemerataan perekonomian daerah yang maju dan inklusif mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan d. Perwujudan pelayanan publik yang berkualitas dan keterbukaan informasi. e. Penguatan implementasi pemanfaatan ruang yang berkelanjutan. f. Pemerataan Infrastruktur Kewilayahan yang berkualitas dan terintegrasi</p>	

Berkaitan dengan tabel diatas, dapat Fraksi Partai Keadilan Sejahtera mengemukakan, ***pertama***, dalam sasaran pokok RPJPD Kota Salatiga 2025-2045 sudah menentukan fokus arah kebijakan bagi sasaran pokok. Misalnya sasaran pokok “Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang terdidik, sehat dan berkualitas,” membagi menjadi 3 (tiga) yaitu kesehatan untuk semua, pendidikan berkualitas dan merentas dan beragama, maslahat dan berkebudayaan maju (*lihat halaman V-12 – V-13 RPJPD Kota Salatiga 2025-2045*). Kesehatan untuk semua mempunyai **fokus** arah kebijakan aspek kesehatan antara lain;

- a. Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat
- b. Penguatan Penyelenggaraan pelayanan kesehatan untuk semua dengan jaminan yang berkualitas, terjangkau dan berkeadilan
- c. Pemenuhan tenaga kesehatan yang berkualitas dan berkompetensi tinggi

- d. Peningkatan kualitas dan penyediaan sarana-prasarana pelayanan kesehatan yang merata dan berkelanjutan
- e. Pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular
- f. Pemerataan akses layanan kesehatan yang universal untuk kesehatan jiwa dan raga yang inklusif dari bayi sampai lansia
- g. Percepatan penuntasan dan pencegahan stunting
- h. Penguatan sistem pengawasan obat dan makanan
- i. Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan Masyarakat

Kedua, dalam hal ini, penyelarasan RPJMD Kota Salatiga 2025-2029 dengan RPJPD Kota Salatiga 2025-2045 perlu melihat kedalaman arah kebijakan dan sasaran pokok, termasuk fokus arah kebijakan dari setiap aspek yang sudah ditentukan dalam RPJPD. Sehingga RPJMD Kota Salatiga 2025-2029 tidak terkesan *sak karepe dewe* karena tidak menjadikan RPJPD Kota Salatiga 2025-2045 menjadi acuan atau referensi dalam penyusunan RPJMD. Walaupun menjadi referensi, cenderung formalistis dan “merudapaksa” visi dan misi (calon) Wali Kota dan Wakil Walikota Salatiga menjadi dokumen RPJMD Kota.

Tabel diatas, pada kolom *Program Prioritas* RPJMD Kota Salatiga 2025-2029 sengaja tidak diisi, karena semakin menunjukkan kesemrawutan saat disandingkan dengan RPJPD Kota Salatiga 2025-2045. Kesemrawutan yang muncul karena hanya ingin memasukkan visi dan misi (calon) Wali Kota dan Wakil tanpa mengkaji secara mendalam dan sistematis dengan RPJPD Kota Salatiga 2025-2045.

3. Dalam dokumen yang dipelajari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, terdapat berbagai sasaran pokok RPJPD Kota Salatiga dalam 20 tahun mendatang. Sasaran pokok ditetapkan untuk menjalankan 5 misi yang sudah diselaraskan dengan 8 Misi RPJPD Provinsi Jawa Tengah yang telah ditentukan.



Fraksi Partai Keadilan Sejahtera setuju menempatkan misi “**mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan berdaya saing**” sebagai misi pertama mengingat pembangunan yang kita lakukan tentunya ditujukan untuk menyejahterakan manusia. Pada era yang serba maju seperti sekarang, Kota Salatiga dituntut agar mampu menghasilkan SDM yang kompetitif, yang mampu beradaptasi dengan kemajuan zaman. Oleh karena itu, pemerintah harus mampu memastikan agar pendidikan di Kota Salatiga lebih berkualitas dan merata.

Dengan menempatkan misi 3 menjadi *prioritas* dalam merancang pembangunan kota Salatiga karena SDM merupakan hal penting dan utama (krusial) sebagai aktor pembangunan. Dalam RPJPD Kota Salatiga 2025-2045 telah mengelaborasi misi “**mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan berdaya saing**” dengan mengatasi permasalahan pendidikan, kesehatan dan demografi di Kota Salatiga. Hal ini selaras dengan Sasaran Pokok RPJPD Kota Salatiga 2025-2045 yang menjadikan “*Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang terdidik, sehat dan berkualitas,*” diurutan pertama.

Selain kesehatan, pendidikan yang berkualitas yang merata yang menjadi elaborasi sasaran pokok memfokuskan arah kebijakan antara lain;

- a. Wajib PAUD 1 tahun dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah
- b. Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas serta peningkatan akses pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah
- c. Pemenuhan dan pemerataan tenaga pendidik yang berkualitas dan berkompentensi tinggi
- d. Penguatan kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah berbasis pengembangan talenta dan karakter, *digital literacy*, dan kondisi lokal Kota Salatiga
- e. Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi
- f. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan nonformal, terutama dalam percepatan peningkatan kualifikasi angkatan kerja
- g. Penguatan dan pengembangan kurikulum pendidikan vokasi berbasis kondisi lokal, potensi, dan keunggulan daerah, serta meningkatkan keterkaitannya dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI)

Inti dari fokus kebijakan adalah guru sebagai tenaga pendidik dan (penguatan) kurikulum, termasuk pemanfaatan teknologi informasi dalam penguatan dan peningkatan kualitas pendidikan di Kota Salatiga.

Misi “**mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan berdaya saing**” melibatkan pembentukan atmosfer pendidikan yang berkualitas dengan melibatkan para pemangku kepentingan untuk meningkatkan kemampuan tenaga pendidik, lembaga pendidikan dan berujung pada kualitas SDM dalam hal ini adalah peserta didik. Dan hal ini sepertinya belum masuk dalam program unggulan Walikota Kota Salatiga.

4. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera konsisten dan berkesinambungan dalam mencapai misi “**mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan berdaya saing**” yang salah satu fokus arah kebijakan pada aspek kesehatan adalah percepatan penuntasan dan pencegahan stunting. Saat ini kita masih berhadapan dengan persoalan stunting. Indonesia Emas 2045 akan tercapai manakala sumber daya manusia yang dipersiapkan terbebas dari kekurangan gizi dan memiliki kesehatan yang paripurna. Cukup beralasan apabila banyak kalangan menyatakan bahwa mengatasi stunting adalah prasyarat mencapai Indonesia Emas 2045. Oleh karena itu butuh sinergisitas antar OPD untuk merancang Pembangunan Kota Salatiga ke depan sejalan dengan tujuan dibentuknya Perda Grand Design Pembangunan Kependudukan Kota Salatiga tahun 2023-2045.

Upaya mengatasi stunting mengacu pada penyelarasan Sasaran Pokok, Arah Pembangunan, Arah Kebijakan dan Indikator Utama Pembangunan yaitu prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita. Prevalensi stunting ini menargetkan dengan *baseline* 2025 sebesar 5,69 dan target 2045 sebesar 3,38. Pemerintah perlu menyusun rencana program agar bisa mencapai target 2045 melalui pencapaian 2025-2029. Penuntasan dan pencegahan stunting ini menjadi bagian dari transformasi sosial yang sudah dicanangkan sebagai Arah Kebijakan.

Mengacu pada permasalahan dan isu strategis pada Bab III hal III-1 RPJPD Kota Salatiga 2025-2045 pada aspek kesejahteraan rakyat, bahwa stunting menjadi luaran dari belum optimalnya pelayanan kesehatan masyarakat. Disebutkan pada dokumen RPJPD tersebut bahwa kasus stunting di Kota Salatiga disebabkan oleh beberapa faktor utama, yaitu pola asuh dalam keluarga, akses air bersih, dan sanitasi serta kekurangan gizi kronis. Selain ketiga faktor tersebut, terdapat faktor lain yang juga berpengaruh terhadap terjadinya kasus stunting di Kota Salatiga yaitu faktor sosial-budaya dan ekonomi. Faktor sosial-budaya berkaitan dengan pernikahan dini dan factor ekonomi berkaitan dengan pendapatan orang tua guna memenuhi kebutuhan sehari-hari.

5. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera mendorong Pemerintah Kota Salatiga agar terus mengembangkan inovasi dalam memberikan pelayanan publik yang terbaik berbasis digital. Dalam jangka panjang, penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) adalah keniscayaan. Dalam hemat Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, sistem pelayanan publik yang terintegrasi akan membuat kinerja pemerintah meningkat dan mampu memuaskan warga masyarakat. Hal ini penting ditekankan karena penyusunan RPJPD Kota Salatiga 2025-2045 ini tentunya bermuara pada kepentingan menyejahterakan masyarakat.

Dorongan ini sesuai dengan misi 5 RPJPD Kota Salatiga 2025-2045, ***“mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, adil dan demokratis dengan memanfaatkan teknologi informasi,”*** dimana juga selaras dengan arah kebijakan periode 2025-2029 yaitu ***“transformasi tata kelola untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik, bersih, adil dan demokratis dengan memanfaatkan teknologi informasi.”*** Dalam hal ini, pemanfaatan teknologi informasi juga menjadi misi yang tertuang dalam RPJMD Kota Salatiga 2025-2029, ***“mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan responsif terhadap pelayanan publik yang berkualitas melalui peningkatan teknologi informasi dan kompetensi sumber daya aparatur.”***

Keselarasan untuk mewujudkan pemerintahan yang berbasis elektronik untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan kompetensi sumber daya aparatur perlu mempertajam prioritas program RPJMD Kota Salatiga 2025-2029 yaitu PROGRAM SI AKAS (Salatiga Akuntabel, Kolaboratif, Adaptif, dan Sigap). Khususnya berkaitan dengan 3 (tiga) program yaitu *pertama*, memperkuat Satu Data Salatiga sebagai rujukan terpadu dalam satu portal dan dapat diakses oleh semua, untuk menciptakan transparansi tata kelola pemerintahan Kota Salatiga. *Kedua*, memperkuat digitalisasi pelayanan kependudukan, catatan sipil dan Perijinan UMKM agar tuntas di tingkat kecamatan. Dan *ketiga*, membangun sistem pengaduan pelayanan publik terpadu sampai tingkat RT (Rukun Tetangga), Melalui Aplikasi Android dan memberikan jaminan respon cepat dalam hari yang sama.

Tata Kelola Pemerintahan yang baik dengan memanfaatkan teknologi informasi tidak sekedar membangun aplikasi, melainkan membangun budaya kerja aparatur dan mendorong perubahan kebiasaan masyarakat sehingga menjadi budaya dalam mendorong terbentuknya kualitas sumber daya aparatur yang sigap, adaptif dan akuntabel. Sekali lagi ini tidak hanya cukup membuat aplikasi, tetapi melembagakan perilaku masyarakat (termasuk sumber daya aparatur) untuk memanfaatkan teknologi informasi untuk melayani masyarakat agar lebih optimal.

6. Terakhir, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menyoroti banyaknya program yang dicanangkan dalam RPJMD Kota Salatiga 2025-2029 dengan kemampuan Pemerintah Kota Salatiga cq. Walikota Salatiga membiayai atau menyusun anggaran yang disesuaikan dengan kemampuan APBD Kota Salatiga. Catatan akhir ini perlu dikemukakan karena relatif ada keterbatasan APBD Kota Salatiga apabila tanpa skala prioritas untuk melaksanakan dan/mewujudkan RPJMD Kota Salatiga 2025-2029. Dalam hal ini, Pemerintah Kota Salatiga cq. Walikota Salatiga sebaiknya juga menyampaikan strategi pembiayaan terhadap program pembangunan. Khususnya bagaimana Pemerintah Kota Salatiga cq. Walikota Salatiga meningkatkan pendapatan (asli) daerah. Sekaligus perlu mengelaborasi program prioritas ke prioritas setiap tahun anggaran dari 2025 sampai dengan 2030. Tanpa elaborasi maka kami menguatkirkan RPJMD Kota Salatiga 2025-2029 menjadi sekedar dokumen tanpa realisasi yang substansial dan mampu menghadirkan kemanfaatan bagi masyarakat.

Sidang Paripurna yang kami hormati

Demikian Pandangan Umum Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) Kota Salatiga Terhadap RPJMD Kota Salatiga Tahun 2025-2029. Apabila dalam penyampaian Pandangan Umum ini ada kekurangan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Salatiga, 10 Juni 2025

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

DPRD KOTA SALATIGA

1. Nono Rohana, S.Ag (Ketua)
2. Agus Warsito (Wakil Ketua)
3. Heru Prastyo, SE, ME (Sekretaris)
4. Latif Nahari, ST (Anggota)

